

KEGIATAN BELAJAR 1**BAB 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN PENDIDIKAN (2)****Dr. Cepi Safruddin Abdul Jabar, M.Pd****1. Hakikat Manajemen Pendidikan**

Setelah terpahami apa yang dimaksud dengan pendidikan (dalam arti mikro dan makro), maka untuk masuk ke pengertian manajemen pendidikan akan lebih mudah. Walaupun manajemen pendidikan itu bukan berarti penerapan prinsip dan konsep “ilmu manajemen” ke dalam pendidikan, karena ada yang bersifat khas, akan tetapi, untuk menjernihkan pemahaman, perlu dibahas terlebih dahulu apa pengertian manajemen itu.

a. Pengertian Manajemen**1) Manajemen sebagai penyelenggaraan**

Istilah *management* dalam bahasa Inggris (yang diserap ke dalam bahasa Indonesia) itu mengandung dua substansi (wujud), yaitu sebagai proses atau kegiatan memanajementi dan sebagai orang yang melakukan kegiatan manajemen tersebut (disebut pula dengan sebutan *manager*). Jadi, jika membicarakan manajemen harus dicermati betul-betul apakah konteksnya dalam makna kegiatan memanajementi ataukah dalam makna manajer. Fungsi manajemen (*management functions*), misalnya, yang tepat berkaitan dengan manajer (fungsi atau tugas pokok manajer), bukan fungsi (tugas pokok) kegiatan memanajementi, karena sesuatu kegiatan (bukan pejabat) tidak punya tugas pokok, yang dipunyainya adalah proses.

Management yang bermakna proses atau kegiatan itu pun artinya juga bermacam-macam, di antaranya:

- a) **Menyelenggarakan atau melaksanakan sesuatu.** Jadi, manajemen pendidikan berarti menyelenggarakan pendidikan, manajemen perusahaan berarti menyelenggarakan perusahaan, manajemen

perkantoran berarti menyelenggarakan kegiatan (urusan) perkantoran, manajemen keuangan berarti menyelenggarakan urusan keuangan.

- b) **Mengontrol atau mengendalikan sesuatu.** Ini dipergunakan misalnya dalam sebutan manajemen konflik (mengendalikan atau mengatasi konflik), manajemen kalbu (mengendalikan kalbu), dan manajemen kelas (mengendalikan perilaku murid di kelas-menurut salah satu “mazhab”).

Dalam perkembangannya kemudian, manajemen dalam arti menyelenggarakan atau melaksanakan itu diberi nuansa yang lebih “ilmiah.” Manajemen bukan sekedar menyelenggarakan atau melaksanakan sesuatu, melainkan menyelenggarakan atau melaksanakannya **dengan lebih baik**, yaitu dengan ditata atau diatur. Penataan pengaturan itulah yang kemudian dalam Bahasa Indonesia disebut dengan **pengelolaan**. Mengelola artinya menata atau mengatur penyelenggaraan/pelaksanaan sesuatu dengan lebih baik.

Berdasarkan konsep tersebut maka ada “*time management*” (pengaturan waktu), “*office management*” (pengaturan, penataan, pengelolaan) kantor (berbagai kegiatan atau urusan perkantoran beserta segala hal yang terkait), “*personnel management*” (penataan, pengaturan, pengelolaan insan-insan pekerja), dan “*financial management*” (pengaturan, penataan, pengelolaan segala urusan yang berkaitan dengan keuangan).

Berdasarkan konsep ini pula maka penerjemahan *classroom management* yang sifatnya mengendalikan perilaku murid akan lebih tepat diindonesiakan sebagai **pengendalian kelas**, bukan pengelolaan kelas. **Pengelolaan kelas** lebih merujuk pada penataan kelas (ruang kelas serta segala isi dan kegiatannya), mencakup tata ruang, tata ajar, tata tertib, dan juga tata krama.

2) Manajemen Sebagai Manajemen-Administratif

Istilah manajemen (*management*) kerap kali disamamaknakan dengan administrasi (*administration*). Maksudnya, baik manajemen, maupun administrasi menunjuk hal yang sama. *Administration* dalam bahasa Inggris

mengandung arti menyelenggarakan atau melaksanakan juga (seperti *management*), misalnya *the administration of test* (pelaksanaan tes).

Berkait dengan makna administrasi dan manajemen sebagai pelaksanaan itu maka sering muncul dalam pembicaraan atau tulisan frasa "*planning and management*" (perencanaan dan pelaksanaan rencana). Seperti akan diketahui dari pembicaraan berikut, *planning* (perencanaan) itu sering dikategorikan sebagai bagian dari pemanajemenan atau pengadministrasian.

Dalam rangka menyelenggarakan organisasi (perusahaan) lebih baik, Henri Fayol (pimpinan perusahaan pertambangan di Perancis), merumuskan apa-apa yang harus dilakukan pimpinan (administrator/manajer) agar perusahaannya berjalan dengan baik. Kegiatan (proses) yang harus dilakukan itu oleh Fayol disebut dengan *administration* (bukunya berjudul *Administration Industrielle et Generale*), yang kemudian di Amerika Serikat diubah menjadi *management* (*General and Industrial Management*).

Mengadministrasikan perusahaan (dan organisasi apapun), menurut Fayol, berarti melakukan tahapan kegiatan (proses): (1) merencanakan (*planning*), yaitu merencanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi/lembaga, (2) mengorganisasikan (*organizing*) atau menata (menggabungkan) berbagai kegiatan tersebut menjadi unit-unit (satuan-satuan) kegiatan organisasi atau jabatan, (3) merekrut dan menempatkan staf atau personil (*staffing*) pada unit-unit kegiatan organisasi atau jabatan tersebut, (4) memberikan perintah atau arahan kerja pada unit dan staf-staf tersebut (*commanding* - kemudian diubah orang menjadi *directing*), (5) menyatukan bahasa dan langkah kegiatan staf dan unit-unit organisasi (*coordinating*), dan (6) mengendalikan kegiatan staf dan unit-unit organisasi (*controlling*) agar senantiasa sejalan dengan rencana yang telah disusun. Proses (kegiatan) tersebut dilakukan berturutan, tidak meloncat-loncat. Perekrutan staf ditentukan oleh jabatan (pekerjaan) yang sudah diorganisasikan. Pemberian perintah (komando) atau pemberian arahan diberikan jika staf (personil) sudah berada dalam unit-unit kegiatan (organisasi).

Langkah-langkah (proses) administrasi (manajemen) tersebut lazim kemudian disebut sebagai fungsi (tugas pokok) manajemen (fungsi manajer). Ada kalanya disebut sebagai *the functions of executives* (tugas pokok para pejabat). Pejabat (manajer, administrator, eksekutif) itu harus melakukan tugas pokok seperti disebutkan di atas dalam “menata” atau “mengelola” organisasi atau lembaga kerjanya. Proses tersebut (berdasar Fayol, tetapi *commanding* diganti *directing*) dapat disingkat sebagai **POSDCoC – *planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling***.

Apa yang disebut di atas, berdasarkan sejarahnya, lazim disebut dengan manajemen administratif, yaitu kegiatan memanajementi organisasi/lembaga kerja dengan menggunakan langkah-langkah pengadministrasian seperti dikemukakan Fayol.

b. Pengertian Manajemen Pendidikan

1) Manajemen pendidikan dalam arti umum

Telah disebutkan di muka bahwa pendidikan itu dapat mengandung makna sebagai pendidikan dalam arti mikro dan makro. Dalam arti mikro pendidikan mengandung makna sebagai kegiatan pembelajaran (pelaksanaan pendidikan). Dalam arti makro pendidikan mengandung makna sebagai kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan penautannya dengan berbagai pranata kemasyarakatan lainnya.

Sesuai dengan makna manajemen sebagai penyelenggaraan atau pelaksanaan sesuatu, maka manajemen pendidikan akan lebih tepat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan, bukan pelaksanaan pendidikan (proses atau kegiatan pembelajaran). Penyelenggaraan pendidikan tersebut dalam bahasa Indonesia kemudian disebut lain agar bernuansakan dilakukan “dengan lebih baik” menjadi pengaturan pendidikan, penataan pendidikan, atau pengelolaan pendidikan. Lengkapnya pengaturan, penataan, atau pengelolaan penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan agar berjalan lebih baik.

Dalam makna umum sebagai pengaturan, penataan, pengelolaan pendidikan seperti itulah istilah manajemen pendidikan digunakan. Ini

penting dikemukakan agar tidak terkesan bahwa manajemen pendidikan harus dalam makna manajemen-administratif (urutan kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menata staf, mengomando/memberi arahan, mengkoordinasikan, dan mengontrol), karena dalam banyak hal tidak cocok digunakan.

Manajemen-administratif akan cocok digunakan pada saat membicarakan manajemen sekolah (dan institusi/organisasi pendidikan sejenisnya), terutama berkait dengan tugas pokok (fungsi) pimpinan (manajer) sekolah. Sekolah sebagai suatu unit (satuan) organisasi pendidikan perlu memamanajementi lembaganya secara administratif, yaitu merencanakan program, mengorganisasikan unit-unit pelaksana program, menempatkan personil dalam unit-unit pelaksana program, melakukan pengarahannya dan koordinasi, serta mengontrol pelaksanaan program sekolah.

Dalam arti umum (menyelenggarakan pendidikan) ini, kegiatan yang bisa dikategorikan sebagai manajemen pendidikan antara lain mengorganisasikan pendidikan, yaitu mengatur (menata) kegiatan penyelenggaraan pendidikan ke dalam unit-unit (satuan) organisasi pendidikan menurut jenis (pendidikan umum, kedinasan, keagamaan, kejuruan dan sebagainya) dan jenjang (prasekolah, dasar, menengah, tinggi).

Kegiatan lain yang termasuk kategori manajemen pendidikan adalah perencanaan pendidikan, yaitu merencanakan sistem dan keperluan penyelenggaraan pendidikan di masa depan (level nasional atau makro, wilayah atau meso, dan daerah atau mikro). Juga termasuk ke dalam kategori ini kegiatan pengembangan kurikulum dan sistem evaluasi pendidikan (hasil belajar), dan pembuatan berbagai peraturan-perundangan.

2) Manajemen pendidikan dalam arti khusus (administratif)

Memamanajementi pendidikan dalam arti khusus (manajemen-administratif), seperti telah disinggung di muka, berlaku dalam konteks organisasi/lembaga pendidikan sebagai satu kesatuan, dan berkenaan dengan tugas pokok (fungsi) administrator/manajer (pimpinan) lembaga tersebut yang harus membuat program kerja kelembagaan. Jadi, kunci

pokoknya pada pembuatan dan pelaksanaan program kerja lembaga/organisasi.

Sebagai contoh yang lazim dilakukan di sekolah-sekolah adalah penerimaan murid baru (PMB). Ada kegiatan yang akan dilakukan (program) kerja. Program penerimaan murid baru itu direncanakan dengan baik (*planning*). Selanjutnya dibentuk kepanitiaan (*organizing*), dan ditunjuk petugas-petugas yang akan melaksanakannya (*staffing*). Selanjutnya dilakukan rapat-rapat koordinasi (*directing and coordinating*). Kemudian bersamaan dengan PMB dilaksanakan, dilakukan pemantauan (*controlling*).

Manajemen-administratif tentu tidak berlaku ketika membicarakan manajemen fasilitas atau sarana dan prasarana (bukan manajemen pengadaan fasilitas). Dalam manajemen fasilitas kegiatan perencanaan fasilitas mungkin ada (dalam rangka pengadaan), pengorganisasian fasilitas tentu tidak ada, penempatan staf fasilitas juga tidak ada, pengarahan fasilitas tidak ada, koordinasi fasilitas pun tidak ada. Manajemen fasilitas lebih mengarah pada pengaturan, penataan, atau pengelolaan fasilitas (bagaimana dimanfaatkan, disimpan dan dirawat dengan baik). Manajemen (pengelolaan) keuangan juga lebih mengarah pada bagaimana uang diperoleh, disimpan, dan dipergunakan dengan baik (akuntabel). Tentang ini akan dibicarakan lebih lanjut.

c. Level Manajemen Pendidikan

1) Pendidikan informal, nonformal, dan formal

Kegiatan pendidikan (pelaksanaan proses pembelajaran) itu, seperti telah disinggung di muka, dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu kemudian **diselenggarakan** dengan lebih tertib dan teratur. Keteraturan dan ketertataan pelaksanaan pendidikan itu memunculkan semacam “bentuk” (sosok, “form”) kegiatan pendidikan yang terorganisasikan. Ada “bentuk” materi pelajaran yang sistematis (kurikulum), ada “bentuk” pendidik yang tetap, ada “bentuk” interaksi pembelajaran yang mapan (teratur, terjadwal), ada “bentuk” pendidik (yang dididik) yang ajeg,

dan ada “bentuk” tempat proses pembelajaran itu dilaksanakan yang ajeg juga.

Berdasarkan keteraturan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan pendidikan yang memunculkan “bentuk” atau “*form*” (baca: organisasi) penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut, pendidikan itu dibedakan menjadi **pendidikan informal** (tak berbentuk, tak terorganisasikan) dan **pendidikan formal** (berbentuk, terorganisasikan: berujud sekolah, madrasah, universitas dsb). Di antara yang bersifat informal dan formal tersebut ada yang “setengah-setengah” (informal bukan, formal pun tidak) yang disebut sebagai **pendidikan nonformal**. Istilah tersebut tampaknya hanya sekedar penyebutan, daripada disebut *semiformal*. Kegiatan pendidikan yang termasuk nonformal itu misalnya kursus-kursus. Kursus diselenggarakan tertib dan teratur, tetapi dalam beberapa hal tidak “seketat” seperti sekolah. Untuk mengikuti kursus faktor umur untuk sebagian tidak menjadi perhatian (siapapun, dalam umur apapun, dapat mengikuti kursus bahasa Inggris di kelas atau taraf yang sama). Untuk bersekolah tidak bisa anak usia 6 tahun bersekolah di SMA, lebih-lebih jika belum tamat SD dan SMP.

Dengan kata lain, pendidikan formal adalah kegiatan pendidikan yang dimanajemeni, sementara pendidikan informal merupakan kegiatan pendidikan yang tidak dimanajemeni. Ada yang mencoba untuk “memanajemeni pendidikan informal.” Jangan-jangan sebenarnya salah persepsi (wawasan), yang dimaksud sebenarnya pendidikan dalam lingkungan keluarga (pendidikan kesejahteraan keluarga atau PKK), lebih khusus lagi pendidikan bagi para orang tua (yang punya anak, bukan orang yang tua usia atau orang dewasa).

Perlu dikemukakan bahwa pendidikan informal itu bisa terjadi di lingkungan sekolah dan lembaga kursus (di lembaga pendidikan formal). Materi didikannya lazim disebut sebagai ***hidden curriculum*** (kurikulum tersembunyi atau tak tampak). Maksudnya kurikulum (materi didikan) yang tidak diprogram atau direncanakan. Kendati tidak direncanakan atau terprogram, tetapi tetap merupakan materi didikan (mengandung unsur

mendidik). Ketika, misalnya, saat pelajaran berlangsung ada seorang murid menguap tanpa menutup mulutnya, kemudian guru (dengan bijak) menyuruhnya menutup mulutnya jika menguap, kegiatan guru tersebut sudah merupakan pendidikan (tentu tidak ada dalam rencana pengajaran atau RPP guru tersebut, karenanya dikategorikan sebagai pendidikan informal).

2) Penyelenggara dan pelaksana pendidikan

Seperti telah disebutkan, kegiatan pelaksanaan pendidikan dimaksudkan kegiatan atau interaksi pembelajaran antara pendidik dan pedidik. Kegiatan pelaksanaan pendidikan itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Jika terorganisasikan menjadi suatu “bentuk” (wujud) yang tertata teratur, disebut sebagai pendidikan yang formal (berbentuk, terorganisasikan).

Kegiatan pelaksanaan pendidikan yang tertata teratur itu diselenggarakan dalam organisasi atau lembaga penyelenggara pendidikan yang antara lain berupa sekolah atau madrasah dan perguruan tinggi. Jadi, sekolah merupakan penyelenggara pendidikan, dan guru-guru yang ada di dalamnya merupakan pelaksana pendidikan.

Murid-murid (yang umumnya masih disebut sebagai anak-anak) yang ada di sekolah itu dulu disebut anak didik (anak yang dididik). Kemudian diubah sebutannya menjadi subjek didik agar (guru punya wawasan untuk) tidak diperlakukan sebagai objek yang bisa “diolah” semau guru. Kemudian diubah lagi sebutannya menjadi peserta didik agar diperlakukan sebagai seseorang yang ikut berperan serta (peserta) aktif dalam kegiatan pembelajaran itu. Dewasa ini ada upaya mengubahnya lagi menjadi pebelajar, yaitu orang yang (aktif) melakukan kegiatan belajar.

Dalam bahasa Inggris ada dua sebutan untuk murid, yaitu *student* dan *learner* (selain sebutan khas “pupil”). *Student* merupakan sebutan bagi orang yang melakukan kegiatan “*study*,” dan *learner* sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan “*learn*.” Ada yang memfalsafahnya secara khusus. Orang bisa belajar (*learn*) di mana saja dan kapan saja, sengaja ataupun tidak

sengaja, sendiri ataupun dengan (melalui) orang lain (guru atau pendidik). Orang yang belajar seperti itu disebutlah sebagai *learner*.

Ada orang yang dengan sengaja dan dengan melalui orang lain melakukan proses belajar. Kegiatan belajarnya itu disebut *study*, dan orangnya disebutlah dengan *student*. Kemudian diusulkan sebutan khas untuk belajar dengan sengaja kepada seseorang itu dengan sebutan *studenting*. Jadi, *learning* bersifat umum (dengan atau tanpa pendidik siapapun), *studenting* bersifat khusus (dengan atau bersama pendidik). Kira-kira mirip dengan “*ta’allum*” dan “*thalabul-‘ilmi*” dalam bahasa Arab.

Dalam pengertian yang agak khusus, guru (pendidik) dapat melakukan **manajemen pengajaran (pendidikan)** untuk kegiatan pelaksanaan pendidikannya, yaitu berupa merencanakan pengajaran, mengatur pelaksanaan pengajaran, dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan pengajaran. **Perhatikan:** tidak seluruh proses manajemen-administratif dilakukan, karena tidak cocok. Perhatikan pula bahwa kegiatan pembelajaran (pengajarannya), termasuk evaluasi hasil belajar (menguji, me-ngetes), bukan bagian dari manajemen pengajaran. Evaluasi pelaksanaan pengajaran (guru) tidak sama dengan evaluasi hasil belajar (murid). Evaluasi hasil belajar termasuk bagian dari kegiatan pembelajaran. Evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan termasuk bagian dari pengelolaan (manajemen) pendidikan (proses *controlling*). Tentu “*controlling*” pelaksanaan pendidikan itu dapat berbasiskan data evaluasi hasil belajar. Dengan kata lain, ada aspek tertentu dari kegiatan pengajaran yang berupa penyelenggaraan pengajaran yang dikelola atau dimanajementi.

Jika sekolah disebut sebagai penyelenggara pendidikan, dan para guru disebut sebagai pelaksana pendidikan, masih ada pihak-pihak yang turut serta “mengelola” pendidikan, yaitu yayasan-yayasan pemilik sekolah swasta dan Pemerintah pemilik sekolah-sekolah negeri. Untuk mudahnya yayasan dan Pemerintah itu disebut sebagai **pengelola pendidikan**. Pengelola pendidikan adalah suatu badan atau instansi (lembaga, organisasi) yang melakukan kegiatan memanajementi organisasi penyelenggaraan pendidikan.

3) Manajemen pendidikan nasional, wilayah/daerah, dan sekolah

Kegiatan memanajemeni pendidikan (dalam arti umum, bukan administratif) itu dapat berlangsung di tingkat nasional (misalnya penetapan formasi dosen PTN), di tingkat wilayah atau daerah (misalnya pendaftaran dan seleksi CPNS guru), dan sekolah (misalnya penerimaan murid baru). Bahkan, seiring dengan globalisasi, manajemen pendidikan itu ada yang bersifat internasional. Lembaga pendidikan di mancanegara bisa menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan (lewat internet) di Indonesia. Di internet sudah banyak tawaran untuk meraih gelar akademik lewat “on-line” atau “e-learning.” Jadi, bukan hanya penyelenggaraan (manajemen) pendidikan yang bisa bersifat nasional, melainkan juga pelaksanaan pendidikan (kegiatan pembelajaran) seperti telah disinggung di atas. Lewat internet saat ini pelaksanaan pendidikan bisa terjadi secara nasional dan internasional.

Dalam konteks nasional dan bukan nasional ini manajemen pendidikan dapat bersifat sentralistik, segala sesuatunya ditetapkan dan diselenggarakan secara nasional oleh Pemerintah Pusat, dapat pula bersifat desentralistik, ditetapkan di wilayah/daerah, bahkan sekolah. Roh desentralistik itulah yang kemudian memunculkan kebijakan “manajemen berbasis sekolah” (MBS). Maksudnya, jika semula manajemen pendidikan berbasis Pemerintah Pusat, dalam hal ini Depdiknas, dewasa ini manajemen pendidikan basisnya sekolah, berada di tangan sekolah.

Kurikulum, misalnya, dahulu ditetapkan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat sampai rinci. Dewasa ini diserahkan rinciannya pada sekolah (satuan/unit organisasi pendidikan - **satuan pendidikan** - terkecil). Dengan kata lain, sekolah (guru) diberi kewenangan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum (materi didikannya) sendiri sesuai dengan karakteristik murid dan situasi serta kondisi sekolah dalam konteks masyarakat setempat.

Di sisi lain, ada kegiatan pelaksanaan pendidikan (kegiatan pembelajaran) yang masih diselenggarakan secara sentralistik (level

nasional), misalnya evaluasi hasil belajar tahap akhir, seperti Ujian Nasional (UN).

4) Organisasi pendidikan

Terkait dengan manajemen pendidikan ada yang disebut dengan organisasi pendidikan. Dalam membicarakan organisasi pendidikan hendaknya tidak dikacaukan dengan definisi organisasi sebagai “himpunan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan”. Organisasi pendidikan dalam hal ini dimaksudkan tatanan penyelenggaraan pendidikan. Berkaitan dengan ini ada dua macam organisasi pendidikan, yaitu: (1) organisasi pelaksanaan pendidikan, dan (2) organisasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Organisasi pelaksanaan pendidikan adalah struktur (susunan) pelaksanaan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan disusun ke dalam jenis dan jenjang (umum, kejuruan dsb, serta dasar, menengah dan tinggi) seperti telah disinggung di muka. Dasar pengorganisasian ini adalah karakteristik dan perkembangan pendidikan dan wawasan mengenai kebutuhan pembangunan bangsa dan negara. Jenjang pendidikan sepenuhnya disusun berdasarkan taraf perkembangan jasmani, rohani, dan sosial pendidikan.

Pendidikan menengah kejuruan, misalnya, dirancang disusun berdasarkan wawasan (persepsi) kebutuhan bangsa dan negara akan tenaga-tenaga terampil dalam bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan dalam pengembangan sektor tertentu. Di sisi lain, mengingat pula tidak seluruh anggota masyarakat bisa dan perlu meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (perguruan tinggi) dan harus langsung bekerja memenuhi kebutuhan hidup.

Organisasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan adalah organisasi (lembaga) yang melakukan kegiatan mengelola dan atau menyelenggarakan pendidikan. Organisasi penyelenggara pendidikan terwujud dalam bentuk taman kanak-kanak, sekolah, perguruan tinggi, dan sejenisnya. Termasuk ke dalamnya pondok pesantren, lembaga kursus, dan juga berbagai padepokan serta sejenisnya.

Organisasi pengelola pendidikan adalah organisasi/lembaga yang mengelola (mengurusi) organisasi-organisasi penyelenggara pendidikan, yang bisa berupa organisasi kemasyarakatan (yayasan pendidikan) atau organisasi pemerintahan.

d. Lingkup Manajemen Pendidikan

Telah disebutkan bahwa ada perbedaan antara manajemen (pengelolaan) dengan pelaksanaan kegiatan khusus (substansial) bidang yang dimanajementi. Mendidik (mengajar) dan mengevaluasi hasil belajar, misalnya, merupakan kegiatan khusus (substansial) bidang pendidikan, bukan manajemen pendidikan. Mengadakan, menyimpan, memelihara, dan menggunakan sarana dan prasarana (fasilitas) merupakan kegiatan khusus substansial kesaranaprasarana, bukan manajemen sarana dan prasarana. Manajemennya (manajemen sarana dan prasarana) adalah mengatur atau menata pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penggunaan sarana dan prasarana tersebut. Konkritnya, misalnya, mengatur/menata sarana dan prasarana apa yang perlu diadakan, kapan diadakan, oleh siapa diadakan, dari/di mana diadakan, dan bagaimana cara pengadaannya.

Telah disebutkan pula bahwa manajemen pendidikan dapat berlangsung di tingkat internasional, nasional, wilayah, daerah, dan bahkan institusional (satuan organisasi pendidikan). Oleh karenanya lingkup dan objek (aspek) yang dimanajementi pun akan sangat beragam, sesuai dengan komponen yang membentuk masing-masing “sistem” (organisasi atau lembaga pendidikan).

Di tingkat sekolah (lembaga pendidikan), misalnya selain komponen internal (pendidik, pedidik, bahan didikan atau kurikulum, sarana dan prasarana, uang, dan staf administratif), akan tercakup pula komponen eksternal semisal komite sekolah sebagai bidang (aspek) yang harus dimanajementi (dikelola). Jadi, di tingkat sekolah akan (bisa) ada manajemen (pengelolaan) staf sekolah (guru dan tenaga administrasi), manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen keuangan sekolah, manajemen

perpustakaan sekolah, manajemen layanan bim-bingan dan konseling, manajemen kegiatan ekstrakurikuler, manajemen humas, dan lain-lain.

Seperti telah dikemukakan, memanajementi itu dapat berarti mengelola atau menata, tidak harus bersifat administratif (POSDCoC). Manajemen sarana dan prasarana (fasilitas), misalnya, seperti telah disinggung di muka, dapat berarti merencanakan pengadaan, mengatur pelaksanaan pengadaan, dan mengatur penyimpanan, pemanfaatan, dan perawatannya, tidak merencanakan fasilitas, mengorganisasikan fasilitas, menetapkan staf fasilitas, mengarahkan fasilitas, mengkoordinasikan fasilitas, dan mengontrol fasilitas.

Bidang-bidang kajian yang tercakup ke dalam “ilmu” dan/atau proses manajemen pendidikan antara lain perencanaan pendidikan (bukan perencanaan program kerja sekolah), kebijakan (*policy*) pendidikan, landasan filosofis manajemen pendidikan, landasan ilmiah (teori) manajemen pendidikan, organisasi pendidikan, dan kepemimpinan pendidikan. Objek-objek yang menjadi bahasan khusus manajemen pendidikan (manajemen kurikulum, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen keuangan, dan lain-lain) akan dibicarakan dalam bab tersendiri.

Perlu dikemukakan bahwa perencanaan program sekolah (perencanaan strategik dan operasional) kerap merupakan bagian dari manajemen pendidikan di sekolah (manajemen sekolah) yang termasuk penting dan mendapatkan perhatian khusus.

A. Rangkuman

1. Manajemen pendidikan, adalah kegiatan sekelompok orang dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Sumber daya terdiri dari peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, humas, organisasi/lembaga, biaya, sarana prasarana, dan ketatalaksanaan/SIM

2. Pentingnya manajemen pendidikan dalam system pendidikan, adalah dengan pengelolaan yang baik maka semua komponen dapat tersedia sesuai standar nasional pendidikan, sehingga mendukung terlenggaranya proses pendidikan sehingga tujuan tercapai secara efektif dan efisien.
3. Fungsi- fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Komponen/Bidang garapan manajemen pendidikan meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, humas, organisasi, biaya, ketatalaksanaan/SIM.